



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : LEGAL, COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GADIS PURWANTI
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 719895

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.230.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 37 m2/37 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 185.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 383.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.500.360.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.298.960.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.298.960.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)

UNIT KERJA : FINANCE DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JASNOVARIA
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 240622

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 202.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 68.531.038

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.271.031.038

III. HUTANG Rp. 816.439.704

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.454.591.334

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : TJSL & ESG DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARDIAN ADHITYA
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 822852

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/330 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	600.000.000
1. MOBIL, HONDA BRV PRESTIGE SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000		
2. MOBIL, HONDA CIVIC TURBO SEDAN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	495.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.895.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.895.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)

UNIT KERJA : CLIENT MARKET & PRICING ACTUARY L & H DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NICO DEMUS
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 518124

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/380 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/55 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/116 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **523.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA 5AD (5X225) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 25V Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
5. MOTOR, YAMAHA MIO GEAR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
6. MOBIL, MITSUBISHI NEW XPANDER CROSS 2025 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000



7. MOBIL, BYD ATTO 1 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
165.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 995.623.132

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.272.217.778

F. HARTA LAINNYA Rp. 915.062.930

Sub Total Rp. 7.405.903.840

III. HUTANG Rp. 1.071.843.752

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.334.060.088

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : HEAD OF CORPORATE TRANSFORMATION MANAGEMENT OFFICE

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOVI KURNIAWATI
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 1011616

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.653.870.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.653.870.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	150.000.000
1. MOBIL, SUZUKI SX4 S-CROSS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	455.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	350.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.489.590.261
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	5.098.460.261
III. HUTANG	Rp.	200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.898.460.261

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Tidak Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : REINSURANCE - PRODUCT UNDERWRITING P & C DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RACHIM CHAN
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 1035012

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/90 m2 di KAB / KOTA BEKASI, Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 239.500.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 550.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.289.500.000

III. HUTANG Rp. 325.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.964.500.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : HC & GA DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROKHMATUL WAKHIDAH
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 870050

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.920.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/65 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 401.100.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 303.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 331.000.000

Sub Total Rp. 7.955.600.000

III. HUTANG Rp. 3.873.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.082.600.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : AKTUARIS PERUSAHAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSUF HIDAYAT KALLA
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 1005990

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/65 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	90.000.000
1. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	53.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	216.844.785
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.359.844.785
III. HUTANG	Rp.	413.170.221
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	946.674.564

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : BUSINESS MANAGEMENT DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADI SURYA
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 891982

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/140 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	90.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS TS EXTRA AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	61.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.404.243.305
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	299.221.882
Sub Total	Rp.	3.457.165.187

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.457.165.187

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : CORPORATE SECRETARY DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AJI IRAWAN
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 887215

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 329.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ E220 Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XRIDE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA HARRIER Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. MOBIL, MERCEDES BENZ 280E Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 290.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 350.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.569.000.000

III. HUTANG Rp. 68.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.501.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)

UNIT KERJA : INTERNAL AUDIT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALISON EFFENDI RITONGA
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 854644

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.869.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 269.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **321.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, SUZUKI KARIMUN WAGON R Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
5. MOTOR, VESPA PX Tahun 1987, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	266.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	774.746.577
F. HARTA LAINNYA	Rp.	48.500.000
Sub Total	Rp.	5.280.246.577
III. HUTANG	Rp.	163.162.424
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.117.084.153

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)

UNIT KERJA : IT DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALLAN ADITYA PRAKOSA DEWO
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 902476

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 354.800.000

1. MOBIL, SUZUKI SPLASH Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000
2. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
274.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 250.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 386.381.809

F. HARTA LAINNYA

Rp. 80.000.000

Sub Total

Rp. 1.071.181.809

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.071.181.809

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : ACCOUNTING DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDIK MULYANA
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 845901

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.450.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/20 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **243.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INOVA REBORN Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **24.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **2.262.060.060**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.979.560.060

III. HUTANG

Rp. 270.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.709.560.060

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.